

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Strategi komunikasi yang telah diterapkan BPS Kota Padang secara manajerial telah melalui tahapan strategi komunikasi mulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Secara keseluruhan, berdasarkan temuan peneliti di lapangan diketahui bahwa pelaksanaan strategi komunikasi dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus penduduk kepada masyarakat Kota Padang telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat.

Seluruh elemen dalam tahapan komunikasi telah dilakukan dengan sebaik-baiknya yaitu pada tahap analisis audiens yang dilakukan oleh BPS Kota Padang adalah melakukan pengumpulan data mengenai potensi desa/kelurahan dan kecamatan di Kota Padang dari Camat dan Lurah yang bersangkutan. Pada tahap penetapan sasaran komunikasi dilakukan dengan pendekatan rumah tangga, yaitu dengan mempetakan wilayah sensus kedalam unit-unit wilayah kecil yang di sebut Blok Sensus (BS) kemudian petugas sensus BPS Kota Padang mendatangi setiap rumah yang ada di peta wilayah blok sensus untuk mendaftarkan masyarakat yang akan menjadi sasaran komunikasi sensus BPS Kota Padang.

Sementara pada penetapan rancangan strategi BPS merancang komunikasi yang strategis, mulai dari rancangan pesan serta media yang dimanfaatkan guna mendapatkan efek komunikasi yang sesuai dengan yang di inginkan yaitu terjadi efek perubahan perilaku pada masyarakat dan bersedia bekerjasama dengan petugas BPS dalam mensukseskan kebijakan sensus penduduk.

Kemudian pada tahap penetapan kebijakan komunikasi, semua kebijakan yang ditetapkan bersumber dari BPS Pusat karena sensus penduduk merupakan perhelatan besar yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia secara serentak dan berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 dengan penanggungjawab pelaksanaan sensus penduduk adalah Kepala BPS oleh karena itu semua kebijakan bersumber dari BPS Pusat, tetapi meskipun demikian setiap penetapan kebijakan yang diambil berdasarkan konsultasi dari banyak pihak

termasuk dari Kepala BPS Kota Padang. Kebijakan yang ditetapkan oleh BPS Kota Padang hanya mengenai rekrutmen dan pelatihan petugas lapangan dari sensus penduduk. Selanjutnya pada tahap implementasi strategi komunikasi dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus penduduk mengacu kepada kalender pelaksanaan SP2010 yang ditetapkan oleh BPS Pusat.

Terakhir pada tahap evaluasi komunikasi yang dilakukan oleh BPS adalah evaluasi efek yaitu perubahan perilaku dari masyarakat pada saat pelaksanaan komunikasi kebijakan sensus, guna mengetahui sejauh mana efektifitas dari pesan yang disampaikan melalui media komunikasi yang digunakan, evaluasi lainnya yaitu mengenai data SP2010 serta kedisiplinan petugas lapangan dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus melalui *Post enumeration survey*.

Peneliti menyimpulkan bahwa BPS Kota Padang selaku pelaksana kebijakan sensus penduduk 2010 di Kota Padang telah melaksanakan tugas dan fungsinya melalui sebuah perencanaan strategi komunikasi yang baik dan terencana. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh BPS Kota Padang dalam mengkomunikasikan kebijakan sensus kepada masyarakat adalah komunikasi bermedia yaitu dengan mensosialisasikan kebijakan sensus penduduk melalui media komunikasi yang ada.

Sementara bentuk komunikasi dalam pelaksanaan mengkomunikasikan kebijakan sensus penduduk kepada masyarakat adalah komunikasi tatap muka dengan masyarakat Kota Padang dan melakukan wawancara terstruktur dengan menggunakan instrumen kuesioner.

B. Saran

1. Disarankan kepada BPS Kota Padang untuk memaksimalkan fungsi komunikasi dan perlu adanya sebuah perencanaan strategi komunikasi yang sangat matang dan terencana serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga diperoleh efek komunikasi yang diinginkan.
2. Disarankan kepada BPS Kota Padang untuk lebih menegatkan lagi bentuk pengawasannya untuk mencegah terjadinya ketidak disiplinan petugas lapangan dalam melaksanakan tugas yang sesuai dengan prosedur.

3. Disarankan kepada BPS Kota Padang untuk memanfaatkan media elektronik dalam melakukan pengawasan kedisiplinan petugas seperti melengkapi petugas lapangan dengan navigasi GPS supaya keberadaan petugas dapat terus dipantau.

